

Akar Konflik Antara Masyarakat Nagari Manggopoh dengan PT. Bukit Sawit Semesta

Wahyu Aulia¹, Nora Susilawati^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: norasusilawati1973@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada akar konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar dari konflik yang terjadi diantara masyarakat Nagari Manggopoh dengan perusahaan. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori konflik oleh Dahrendorf. Penelitian ini dilakukan di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk, Basung, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan pada penelitian ini dengan cara *purposive sampling* dengan informan sebanyak 12 orang dengan kriteria-kriteria informan yaitu, masyarakat nagari manggopoh, pemerintah daerah, tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang ikut serta dalam penyelesaian konflik, sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akar konflik masyarakat nagari manggopoh dengan perusahaan yaitu, masyarakat meminta kejelasan perusahaan tentang administrasi tata letak perusahaan, dan serikat pekerja, serta transparansi dalam penerimaan karyawan.

Kata Kunci: Akar konflik; Masyarakat; Perusahaan.

Abstract

This research focuses on the roots of conflicts that occur between communities and companies. This study aims to analyze the roots of the conflict that occurred between the Manggopoh Nagari community and the company. This research was analyzed using conflict theory by Dahrendorf. This research was conducted in Nagari Manggopoh, Lubuk District, Basung, Agam Regency. This research uses a qualitative approach with a case study research type. Data collection in this study was carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. The selection of informants in this study was by purposive sampling with 12 informant criteria with informant criteria, namely, the Manggopoh Nagari community, local governments, traditional leaders and community leaders, as well as parties who participated in conflict resolution, so that it could be used to achieve the objectives in the research. Data analysis was performed with an interactive model developed by Miles and Huberman. Based on the results of the research conducted, the results of this study show that the root of the conflict between the community and the company is that the community asks for the company's reasons about the administration of the company's layout, and trade unions, as well as transparency in employee acceptance.

Keywords: Community; Company; Roots of conflict.

How to Cite: Aulia, W. & Susilawati, N. (2023). Akar Konflik Antara Masyarakat Nagari Manggopoh dengan PT. Bukit Sawit Semesta. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 6(4), 403-411.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2023 by author.

Pendahuluan

Konflik merupakan suatu hal yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik merupakan suatu perselisihan, pertentangan yang terjadi akibat dari adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sosial masyarakat. perbedaan-perbedaan tersebut bisa seperti perbedaan pendapat, cara pandang, pemahaman, kepentingan, serta perbedaan latar belakang seperti perbedaan suku, agama, ras, bahasa, profesi, dan lainnya. Konflik yang di sebabkan karena adanya kontak sosial antar manusia atau masalah-masalah yang timbul akibat adanya hubungan antar manusia disebut dengan konflik sosial (Putri, 2018). Masyarakat tidak pernah lepas dari adanya konflik. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*) dan konflik antar negara (*interstate conflict*), setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangan pada masing-masingnya (Irwandi & Chotim, 2017).

Konflik pada kehidupan dapat diasumsikan sebagai relitas, konflik bisa terjadi antara individu dengan individu dengan komunitas masyarakat, atau antarkomunitas masyarakat. Konflik dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja (Afandi, 2016). Berdirinya PT Bukit Sawit Semesta (BSS) di Nagari Manggopoh diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sangat berharap dengan adanya investor yang datang dan membangun perusahaan didaerah mereka karena dapat membantu menyejahterakan masyarakat terutama pada bidang ekonomi. Konflik hadir sebagai manifestasi dari adanya ketegangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial, serta ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi dan adanya sumber daya mobilisasi (Irwandi & Chotim, 2017).

Konflik antara masyarakat Nagari Manggopoh dengan perusahaan terjadi sekitar tahun 2017, dimana masyarakat menilai kehadiran perusahaan didaerah belum memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dari hal itu masyarakat yang kecewa bahwa perusahaan belum menepati janji kepada masyarakat. Hal tersebut memunculkan konflik dimana pada konflik ini masyarakat sampai melakukan aksi unjuk rasa dan memblokade akses jalan menuju perusahaan hingga terjadinya benturan dilapangan. Adapun aksi unjukrasa dan memblokade jalan merupakan suatu wujud kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat. Dimana masyarakat dalam melakukan berbagai aksi seperti memblokade jalan dan lainnya bertujuan agar konflik yang terjadi serta tuntutan-tuntutan masyarakat dapat dengan cepat ditanggapi oleh pihak perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akar konflik antara masyarakat nagari manggopoh dengan PT Bukit Sawit Semesta.

Penelitian terkait konflik antara masyarakat dengan perusahaan juga sering terjadi di berbagai daerah lainnya. Penelitian yang berkaitan tentang konflik antara masyarakat dengan perusahaan sudah banyak ditulis seperti penelitian yang dilakukan oleh Pertama, Utari, Zubir & Lindayanti (2021) dimana pada penelitian ini konflik terjadi dari hadirnya perusahaan PT perkebunan kelapa sawit menyebabkan konflik diantara masyarakat kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dengan perusahaan kelapa sawit. Kedua, penelitian oleh Periady & Musa (2020) penelitian ini konflik sosial antara perusahaan perkebunan sawit PT Fajar saudara Lestari dengan masyarakat Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya disebabkan karena perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Ketiga, Diah Arimurti, Fitriyah, dan Wiwik Widayati (2018) pada penelitian ini menunjukkan bahwa akar dari permasalahan yang menimbulkan dari terjadinya konflik diantara masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira karya sakti itu disebabkan oleh adanya faktor kepentingan. Dari beberapa penelitian relevan di atas dimana pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian terdahulu mengkaji tentang konflik, dan penyebab konflik yang terjadi diantara masyarakat dengan perusahaan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada faktor penyebab konflik yang terjadi diantara masyarakat dengan perusahaan, sehingga pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Akar Konflik Antara Masyarakat Nagari Manggopoh Dengan PT BSS”.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Abdussamad, 2016). Penelitian ini sudah dilakukan sejak Mei 2023 sampai Juli 2023. Penelitian ini dilakukan di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang merupakan sebuah metode sampling non random sampling yang artinya dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok bertujuan agar riset diharapkan bisa menanggapi kasus riset (Lenaini, 2021). Informan pada penelitian ini berjumlah 12 orang informan,

yang terdiri dari 1 orang Wali Nagari Manggopoh, Kepala Seksi Pemerintahan Nagari 1 orang, Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang informan, dan 6 orang informan dari masyarakat Nagari Manggopoh, serta 2 orang informan lagi berasal dari pihak PT BSS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *passive participation*. Setelah observasi peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian, Data juga didapatkan melalui dokumen dan notulen yang dimiliki pemerintah Nagari Manggopoh. Agar data yang diperoleh dapat dikatakan valid maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Menurut Sugiyono, triangulasi merupakan teknik pengumpulan data data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada (Senjaawati Arum & Fakhrudin, 2017). Agar data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (1984) yang melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi (Murdiyanto, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Konflik yang terjadi antara masyarakat Nagari Manggopoh dengan perusahaan berawal dari munculnya rasa dirugikan, ketidakadilan, dan kekecewaan dari masyarakat kepada pihak perusahaan PT BSS. Dimana masyarakat telah menyampaikan tuntutan-tuntutannya kepada pihak perusahaan namun tuntutan tersebut belum dipenuhi dan belum mendapat respon dari pihak perusahaan PT BSS. Hal tersebut menjadi penyebab munculnya konflik sosial antara masyarakat Nagari dengan perusahaan. Masyarakat melakukan segala cara seperti memblokir akses jalan menuju pabrik perusahaan PT BSS demi memperjuangkan hak dan tuntutan mereka kepada pihak perusahaan.

Tidak Ada Konfirmasi Pada Penulisan Administrasi Tata Letak Perusahaan

Dimana sekitar tahun 2017 pada saat pembangunan PT BSS sudah selesai dan perusahaan sudah mulai beroperasi. Pada saat itu sebagian masyarakat melihat pada bagian depan perusahaan yang bertuliskan nama perusahaan dan alamat perusahaan yang mencantumkan nama salah satu Jorong di Nagari Manggopoh. Dimana penulisan letak perusahaan tersebut dilakukan oleh perusahaan tanpa konfirmasi perusahaan dengan masyarakat seperti melakukan rapat dan lainnya untuk penulisan nama Jorong pada administrasi letak perusahaan. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak terima, terutama bagi masyarakat Batu Hampar Nagari Manggopoh. Masyarakat menilai bahwa perusahaan PT BSS terletak pada dua Jorong yang ada di Nagari Manggopoh, yaitu pada Jorong Pasar Durian dan Jorong Batu Hampar, sehingganya tidak adil jika mencantumkan nama Jorong Pasar Durian saja. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Adri, beliau mengatakan:

“...Sabananyo awal tabantuak pabrik tatulih dimuko pabrik tu dindiang tu tatulis PT BSS jo namo Jorong Pasar Durian, memang indak ado dirapekan atau baanyo dulu penulisan tu alah namo tu langsung se ado diperusahaan. Tapi, awalnya kalau di kaji dari segi geografisnyo pabrik ko labiah gadang lataknnyo di Jorong Pasar Durian, untuak menghindari tajadi konflik diantara Jorong Batu Hampar samo Jorong Pasar Durian jadi dirubah baliak indak di buek ateh namo Jorong lai do, tapi ateh namo Nagari Manggopoh di buekan lai, supaya jan ado kesenjangan diantara dua Jorong ko. Sabananyo walaupun ditulis bana Jorong Pasar Durian disitu ndak ka maagiah pangaruah dalam urusan apo-apo se do. Kok tenaga karajo gai tetap se perusahaan bapaton ka anak Nagari Manggopoh labiah di dahulukan karajo, jadi panulisan namo tu indak ado mambaok parubahan apo-apo sabananyo...” (Wawancara pada 17 Juli 2023).

Artinya:

“...Sebenarnya awal dibangunnya pabrik ini sudah tertulis pada perusahaan yaitu nama perusahaan yaitu PT BSS yang sekaligus beralamat di Jorong Pasar Durian Nagari Manggopoh. Terkait penulisan itu memang sebelumnya tidak ada rapat mengenai nama Jorong tersebut tapi memang sudah ada tertulis pada tembok depan perusahaan itu. Kalau dikaji dari segi geografis pabrik ini sebagian besar berada di Jorong Pasar Durian, jadi untuk menghindari konflik antara masyarakat Jorong Batu Hampar dengan Jorong Pasar Durian maka dirubahlah menjadi berada di Nagari Manggopoh agar tidak ada kesenjangan antara kedua Jorong tersebut. Sebenarnya walaupun ditulis nama Jorong Pasar Durian pada administrasi tata letak perusahaan tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap masyarakat, seperti penerimaan tenaga kerja perusahaan tetapi mendahulukan masyarakat yang mengatas

namakan masyarakat Nagari Manggopoh bukan dari Jorong manapun, jadi penulisan nama tersebut sebenarnya tidak memberikan dampak apa-apa...” (Wawancara pada 17 Juli 2023).

Penulisan pada administrasi letak perusahaan ini sebenarnya bukan permasalahan yang krusial namun, bagi sebagian masyarakat di Nagari Manggopoh terutama Jorong Batu Hampar ini merupakan hal yang paling prinsip. Dari adanya penulisan bahwa perusahaan terletak di Jorong Pasar Durian Nagari Manggopoh, menyebabkan masyarakat menjadi terblok-blok dimana terdapat blok masyarakat Jorong Batu Hampar, dan Jorong Pasar Durian. Padahal masyarakat pada kedua Jorong tersebut masih merupakan bagian pada satu Nagari yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wali Nagari Manggopoh, Ridwan, A.Md., Dt. Tumbijo karena sentral dari perusahaan yang belum cukup baik dengan lingkungan kemasyarakatan oleh karena itu masyarakat menilai bahwa dari tindakan yang dilakukan perusahaan dinilai kurang baik seperti pada penulisan nama Jorong Pasar Durian pada administrasi tata letak perusahaan, beliau mengatakan:

“...Sabananyo iko hanyo permasalahan yang tidak terlalu krusial, namun karno secara lingkungan kemasyarakatan sentral dari perusahaan kurang rancak, timbullah arah dari masyarakat menjadi ber blok-blok. Ado blok jorong batu hampar, dan blok jorong pasar durian, karno disitu tumbuh perekonomian baru itu sabananyo. Jadi disitu ado keinginan di masing-masing wilayah jorong, padahal masing jorong tu barado di nagari manggopoh. Tetapi, pado saat itu konflik ko dibaok ka ranah yang labiah ketek. Dalam arti kato “tapak pabrik ko di tampek kami ko” jadi ujuangnyo masyarakat batanyo kami dapek apo? Satalah dek masalah iko dijalehan bahwa latak perusahaan bukan talatak di Jorong iko, di Jorong itu, tapi perusahaan talatak di Nagari Manggopoh...” (Wawancara pada 18 Februari 2023).

Artinya:

“...Sebetulnya ini permasalahan yang tidak terlalu krusial, namun secara lingkungan kemasyarakatan sentral dari lingkungan perusahaan kurang bagus sehingga muncullah arah dari masyarakat menjadi ter blok-blok. Ada blok dari Jorong Batu Hampar, dan ada blok dari Jorong Pasar Durian, blok tersebut terbentuk karna disitu tumbuh perekonomian baru. Jadi, disitu ada keinginan dari masing-masing wilayah Jorong, yang pada dasarnya kedua Jorong tersebut masih berada di Nagari Manggopoh, tetapi konflik ini di bawa kepada cakupan ranah yang lebih kecil dimana masyarakat menjelaskan bahwa pabrik dari perusahaan juga berada di tempat kami, dan kami dapat apa? Setelah masalah tersebut diselesaikan di Nagari dan dijelaskan kepada masyarakat bahwa perusahaan bukan terletak di Jorong ini dan itu, tetapi perusahaan tersebut terletak di wilayah Nagari Manggopoh...” (Wawancara pada 18 Februari 2023).

Dari hasil wawancara diatas menurut peneliti, Penulisan nama Jorong Pasar Durian pada administrasi tata letak perusahaan sebenarnya tidak terlalu penting namun, bagi sebagian masyarakat terutama masyarakat di Jorong Batu Hampar menganggap bahwa hal tersebut sangat penting dan perlu untuk dijelaskan. Pada dasarnya tindakan perusahaan yang tidak melakukan konfirmasi terkait penulisan letak perusahaan membuat sebagian masyarakat menilai adanya perlakuan yang berbeda dari perusahaan kepada masyarakat. Berdirinya PT BSS (Bukit Sawit Semesta) di Nagari Manggopoh seiring dengan pembangunannya PT BSS di Nagari Manggopoh kerap terjadi konflik. Dimana konflik antara masyarakat Nagari Manggopoh dengan perusahaan dimulai sekitar tahun 2017. Konflik masyarakat dengan perusahaan tidak lain adalah tentang pemenuhan tuntutan-tuntutan masyarakat kepada perusahaan. konflik yang terjadi diantara masyarakat dengan PT BSS tidak lain dari adanya rasa ketidak puasan, kekecewaan, dan ketidakadilan dari sebagian masyarakat. Masyarakat menilai bahwa selama berdirinya perusahaan masyarakat belum mendapatkan apa-apa, sehingganya masyarakat menuntut perusahaan agar dapat memperhatikan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat. Adapun tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat kepada perusahaan yaitu pertama, mengenai serikat pekerja bongkar muat, dan transparansi dalam penerimaan karyawan di perusahaan.

Serikat Pekerja Bongkar Muat

Konflik ini juga berkaitan dengan penulisan nama Jorong Pasar Durian pada administrasi tata letak perusahaan. Dimana masyarakat pada Jorong Batu Hampar mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan apa-apa dari semenjak didirikannya pabrik PT BSS di Nagari Manggopoh. Masyarakat Jorong Batu Hampar menyebutkan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak mereka sebagai anak Nagari. Pada konflik terkait administrasi tata letak yang sudah membuat masyarakat menjadi ter blok-blok yaitu masyarakat Jorong Batu Hampar dan masyarakat di Jorong Pasar Durian. Dimana pada awal berdirinya PT BSS karena belum adanya serikat pekerja maka dibentuklah suatu serikat pekerja oleh masyarakat pada

orong pasar durian Bernama IPTJ (Ikatan Pekerja Taratak Jaya), yang pada awalnya hanya beranggotakan masyarakat Jorong Pasar Durian Nagari Manggopoh, sehingganya serikat pekerja IPTJ yang awalnya dari masyarakat Jorong Pasar Durian disatukan dengan serikat Sakato yang kemudian disahkan oleh Nagari manggopoh dengan diberi nama IPTJS (Ikatan Pekerja Taratak Jaya Sakato) yang diresmikan sebagai ikatan pekerja Nagari Manggopoh yang bekerja di PT BSS. Sesuai dengan latar belakang perusahaan yang berada pada dua Jorong di Nagari Manggopoh yaitu Jorong Pasar Durian dan Jorong Batu Hampar. Maka, masyarakat Jorong Batu Hampar meminta agar serikat pekerja di PT BSS yaitu IPTJS kepengurusan dan anggotanya dibentuk dengan adil.

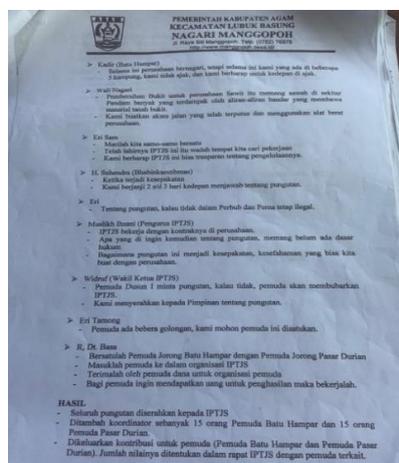
Konflik mengenai serikat pekerja ini muncul karena masyarakat merasa tidak adil terutama pada masyarakat Jorong Batu hampar karena pada serikat yang dibentuk pada struktur kepengurusan dan coordinator lapangan banyak dari masyarakat Jorong Pasar Durian, dan masyarakat juga mengatakan bahwa masih terdapat masyarakat di beberapa desa yang tidak diajak masuk ke serikat pekerja tersebut. Sehingganya, masyarakat menuntut perusahaan agar dapat menyelesaikan persoalan serikat pekerja ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sudirman, beliau mengatakan:

"...Konflik ko sabananyo satalah dirubah namonyo dari IPTJ manjadi IPTJS jadi disinan tuntutan massa perjanjian antaro Batu Hampar jo Pasar Durian harus saimbang. Pangkajian awalnyo dulu karano latak pabrik di Jorong Batu Hampar dan Jorong pasar Durian, mako dari itu kaduo Jorong ko indak dapek di pisah, harus berimbang. Jadi dari serikat pekerja tadi harus berimbang, missal pengurus ado 6 jadi 3 dari Pasar Durian dan 3 dari Batu Hampar, begitu juo samo dalam karajo anggotanyo. Jadi dek karano ado raso ndak adil dari pengurus serikat pekerja itu mako muncullah konflik tu, dek maraso indak adil. satalah di parundiangn baliak lah diatur sacaro adil lah ndak ado sampai kini massa bakonflik baliak do..." (Wawancara pada 19 Juni 2023).

Artinya:

"...Konflik ini sebenarnya setelah di rubah nama dari serikat pekerja dari IPTJ nmenjadi IPTJS Dari situlah tuntutan massa yaitu perjanjian antara masyarakat Batuhampar dengan Pasardurian haruslah seimbang. karena dari awalnya letak pabrik tersebut terletak di Jorong Batuhampar dan jarang Pasar Durian maka dari itu kedua jalan tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi serikat pekerja pun harus seimbang misalkan dari pengurus dibutuhkan enam orang jadi tiga orang diambil dari Jorong pasar durian dan tiga orang lagi dari Jorong Batu Hampar. Begitu juga dalam kerjaan anggotanya jadi karena ada rasa ketidakadilan dari pengurus serikat pekerja yang sudah ada sebelumnya maka muncullah konflik karena ada adanya rasa ketidakadilan tersebut, tapi setelah dimusyawarahkan kembali dan diatur secara adil sekarang sudah tidak ada lagi masa yang berkonflik...". (Wawancara pada 19 Juni 2023).

Pernyataan tersebut juga dibuktikan dari hasil notulen rapat dikantor Wali Nagari Manggopoh pada tanggal 07 Mei 2018 sebagai berikut:



Gambar 1. Notulen rapat dikantor Wali Nagari Manggopoh pada tanggal 07 Mei 2018
Sumber: Wali Nagari Manggopoh

Dimana pada hasil notulen rapat yang dilakukan pada saat itu menjelaskan bahwa terdapat 15 orang koordinator dari Jorong Batu Hampar dan 15 orang koordinator yang berasal dari Jorong Pasar Durian.

Konflik terkait serikat pekerja bongkar muat kelapa sawit di PT BSS tidak berhenti. Setelah semua struktur kepengurusan, koordinator lapangan, hingga anggota telah dibentuk dengan adil namun, ternyata permasalahan mengenai serikat pekerja ini masih tetap berlanjut. Muncullah serikat pekerja baru yang masuk ke lingkungan PT BSS yaitu FSPTI (Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia). Kedua serikat pekerja yang saling berkonflik memperebutkan untuk menjadi mitra dari perusahaan, sehingganya dari perebutan tersebut terjadilah konflik hingga masyarakat sempat melakukan aksi di wilayah perusahaan. Munculnya serikat pekerja baru disebabkan karena rasa ketidakadilan, karena tidak mendengarkan keluhan anggota dan masih masyarakat yang tidak dapat bergabung dengan serikat pekerja IPTJS. Dimana yang membentuk dan termasuk kedalam serikat pekerja yang baru ini dahulunya juga merupakan anggota dari serikat IPTJS orang yang membentuk serikat baru ini dahulunya merupakan koordinator lapangan pada IPTJS, serta anggota dari serikat baru ini juga diambil dari anggota IPTJS dan masyarakat Jorong Batu Hampar yang belum termasuk kedalam serikat pekerja. Pernyataan tersebut juga di sampaikan oleh Bapak Amai (64 tahun) beliau mengatakan bahwa:

“...Nyo urang ko dulu ikuik IPTJS kamudian, dek mungkin ado hal lain atau urang nan maagiah informasi bahaso itu di Jorong awak manga urang Jorong Pasar Durian mambantuak, dek itulah nyo bantuak serikat pekerja yang baru oleh urang batu hampa ko dan nyo masuakan serikat baru ko ka perusahaan tapi perusahaan indak manarimo, karano alah ado serikat kerja ndak mungkin duo serikat kerja nan bakarajo di perusahaan dan dek itulah mereka diam, tapi, satalah di duduakan masalah ko di perusahaan, IPTJS tetap manang dan bakarajo di perusahaan karena alah mitra dan dikontrak oleh perusahaan. dan untuak serikat pekerja na baru tabuek tadi, para anggotanyo yang dulunyo manjadi anggota IPTJS dimasukan Kembali ka IPTJS karano dianggap korban sadangkan beberapa oknum yang mambantuak serikat baru ko walaupun berasal dari IPTJS dulunyo indak bisa dimasuakkan ka IPTJS baliak karna dianggap penghianat...” (Wawancara 18 Juni 2023).

Artinya:

“...Dulunya ramg-orang ini sudah bergabung di IPTJS mungkin dikarenakan ada hal lain, atau mendapat informasi terkait pembentukan serikat dari masyarakat Jorong Pasar Durian sehingga muncul serikat pekerja baru yang didirikan oleh masyarakat dari Jorong Batu Hampar. Serikat Pekerja baru tersebut ingin mengambil alih posisi Serikat Pekerja sebelumnya akan tetapi karena perusahaan tidak bisa menerima Serikat Pekerja lain karena sudah ada kontrak dengan serikat sebelumnya, sehingganya setelah permasalahan ini diluruskan para anggota dari Serikat Pekerja yang baru kembali bergabung ke IPTJS sedangkan beberapa orang yang dianggap penghianat tidak bisa diterima kembali sebagai anggota...” (Wawancara 18 Juni 2023).

Kedua serikat pekerja yaitu IPTJS dengan FSPTI yang saling memperebutkan untuk menjadi mitra dari PT BSS, sehingganya dari perebutan tersebut terjadilah konflik. FSPTI yang melakukan aksi memblokade jalan menuju perusahaan sehingga menyebabkan aktivitas bongkar muat menjadi terganggu. Dikarenakan aksi yang dilakukan oleh FSPTI membuat serikat pekerja Nagari Manggopoh yaitu IPTJS turun ke lapangan bersamaan dengan pemuda setempat, sehingganya terjadi benturan dilapangan. Akan tetapi, serikat pekerja FSPTI tersebut tidak dapat menyingkirkan IPTJS serikat pekerja Nagari yang telah menjadi mitra dengan perusahaan sehingganya mereka memilih untuk mengundurkan diri. Beberapa dari anggota serikat pekerja baru tersebut yang dahulunya merupakan anggota dari IPTJS diterima kembali menjadi anggota di IPTJS sedangkan yang terlibat dalam pembentukan serikat pekerja yang baru tersebut tidak diizinkan bergabung kembali walaupun dulu mereka juga bagian dari IPTJS.

Transparansi dalam penerimaan karyawan

Pada tuntutan lainnya, masyarakat menuntut pihak perusahaan agar adanya transparansi dalam penerimaan karyawan kepada masyarakat, karena hal itu masyarakat menilai bahwa perusahaan lebih banyak menerima karyawan pada masyarakat di luar Nagari Manggopoh dibandingkan masyarakat lokal. Masyarakat mengira bahwa dengan berdirinya perusahaan akan menerima seluruh anak Nagari untuk bekerja pada perusahaan. Namun, pada dasarnya perusahaan tentu memiliki kualifikasi dan Batasan dalam penerimaan dan pemilihan karyawan yang akan bekerja di perusahaan. Tentu dalam penerimaan karyawan perusahaan harus dengan teliti menerima orang-orang yang memang memenuhi kualifikasi dan mampu bekerja pada bidang yang dibutuhkan perusahaan, karena karyawan juga akan membarikan pengaruh terhadap kualitas perusahaan. hal ini sama halnya seperti pada saat wawancara peneliti dengan Bapak Adri, beliau mengatakan bahwa:

“...Sabananyo kalau untuak karyawan perusahaan bukan banyak manarimo urang lua, perusahaan selalu mandahuluan masyarakat nan di Nagari Manggopoh. Adpoun misalnyo anak Nagari Manggopoh malamar karajo ka pabrik akan labiah diprioritaskan perusahaan, tapi tergantung samo jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan lo. Kalau sadonyo ka perusahaan tantu indak bisa. Ciek lai mengenai urang lua, kadang di urang awak nyo nio mandapek karajo pado posisi yang inyo ndak ahli dibidangnyo tantu indak bisa. Tantu perusahaan akan mencari urang yang berkompeten dibidangnyo, karna itukan bisa marugikan perusahaan ujuangnyo...” (Wawancara 17 Juni 2023).

Artinya:

“...Sebenarnya pada penerimaan karyawan perusahaan selalu mendahulukan masyarakat lokal, seperti anak nagari manggopoh, akan tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan yang diinginkan perusahaan, serta untuk pada bidang tertentu perusahaan pasti juga memilih karyawan yang berkompeten pada bidangnya...” (Wawancara 17 Juni 2023).

Masyarakat menuntut bahwa seharusnya perusahaan menepati janji dalam surat permohonan yang sudah diberikan dimana salah satunya berisi agar perusahaan lebih mengutamakan ketenaga kerjaan 65% dari anak Nagari manggopoh dan 35% dari masyarakat luar. Pada sebenarnya hal ini sudah diindahkan oleh pihak perusahaan namun, dikarenakan pada perekrutan karyawan perusahaan tidak bisa menerima karyawan pada masyarakat lokal pada bidang dan posisi tertentu, dan perusahaan juga memiliki Batasan dalam penerimaan karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan, maka dari itu tidak memungkinkan jika perusahaan menerima seluruh masyarakat menjadi karyawan di PT BSS. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak perusahaan yaitu Bapak Dicky Wahyudi (27 tahun), beliau mengatakan:

“...Kita dari perusahaan pasti memiliki batasan dalam penerimaan karyawan. Tidak mungkin kita menampung seluruh masyarakat untuk dapat bisa bekerja di perusahaan ini atau memecat karyawan kita yang sudah bekerja untuk digantikan dengan karyawan yang baru. Dalam pemilihan karyawan tentu dalam penerimaan karyawan kita memiliki kualifikasi tertentu. Karyawan yang berasal dari masyarakat Nagari Manggopoh yang bekerja di perusahaan selalu kita utamakan, baik jika melakukan kesalahan dan memungkinkan untuk diganti maka kita akan mencari gantinya pada masyarakat Nagari Manggopoh bukan pada masyarakat luar karena kita selalu menjaga kesepakatan yang 65% tersebut. Namun, pada bidang tertentu yang memang dibutuhkan tenaga ahli pada bidangnya perusahaan lebih memperhatikan untuk penerimaan pekerja...” (Wawancara 15 Juli 2023).

Perusahaan berusaha untuk mengutamakan untuk tenaga pekerja lokal, yaitu anak nagari untuk bekerja diperusahaan, akan tetapi terkait dari permintaan masyarakat kepada perusahaan yaitu pihak perusahaan menyebutkan bahwa masyarakat meminta ditempatkan pada beberapa posisi diperusahaan sedangkan kualifikasi yang dimiliki tidak memenuhi syarat dari perusahaan oleh karenanya perusahaan tidak bisa memenuhi hal tersebut, karena pada beberapa posisi tertentu pastinya perusahaan memiliki kualifikasi tertentu, serta memiliki keahlian terkhusus pada bidang-bidang yang ada diperusahaan. Hal itu ditujukan perusahaan pada pemilihan karyawan, karena jika hal tersebut tidak diperhatikan oleh perusahaan maka akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dalam mengkaji akar konflik antara masyarakat Nagari Manggopoh dengan perusahaan. Peneliti menganalisis penelitian ini menggunakan teori konflik dari perspektif Ralf Dahrendorf. Ralf Dahrendorf menganggap konflik muncul melalui relasi-relasi sosial dalam system, jika individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam system maka tidak akan terlibat kedalam konflik. Jika relasi-relasi distruktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan atas kontrol dan saksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa (Hasibuan & Susilawati, 2023). Menurut Dahrendorf konflik timbul dikarenakan adanya ketidak seimbangan antara hubungan diantara hubungan-hubungan dalam system sosial. Ketidak seimbangan tersebut seperti, kesenjangan status sosial, serta kekuasaan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi. Menurut Ralf Dahrendorf relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan (Jhonson, 1986).

Menurut Ralf Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus, tidak ada masyarakat yang tidak berkonflik dan tidak berkonsensus. Ralf Dahrendorf memusatkan perhatiannya kepada struktur sosial yang lebih luas dimana berbagai posisi dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda beda otoritas tersebut tidak terletak di dalam diri individu tetapi pada posisi sehingga tidak bersifat statis. Otoritas yang melekat pada posisi merupakan kunci dalam analisis Ralf Dahrendorf. Adanya

superordinasi dan subordinasi, dimana otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi karena terdapat dua kelompok konflik yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang memiliki kepentingan tertentu (Safrizal, 2022).

Ralf Dahrendorf memaparkan tentang kelompok konflik dan perubahan. Dimana ia membedakan tiga tipe utama kelompok yaitu, kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik (Tualeka, 2017). Fungsi atau kosekuensi konflik adalah menimbulkan perubahan struktur sosial khususnya yang berhubungan dengan struktur otoritas. Ralf Dahrendorf membedakan tiga tipe perubahan structural yaitu: perubahan personel di dalam posisi dominasi, perubahan sebagian personel dalam posisi dominasi, digabungkannya kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa. Menurut Ralf Dharendorf otoritas atau kekuasaan terdiri dari penguasa dan orang yang dikuasai dari otoritas akan membentuk tiga kelompok sosial dalam masyarakat yaitu terdapat kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik (Jhonson, 1986).

Konflik yang terjadi antara masyarakat Nagari Manggopoh dengan PT BSS berawal dari tuntutan-tuntutan masyarakat yang belum dipenuhi oleh perusahaan, sehingga memunculkan rasa ketidakadilan, dan rasa dirugikan oleh masyarakat. Dimana tuntutan yang diminta pertama yaitu mengenai kejelasan tata letak perusahaan. Masyarakat meminta pihak perusahaan agar dapat menjelaskan letak perusahaan karena dalam administrasinya perusahaan terletak pada Jorong Pasar Durian Nagari Mabggopoh. Penetapan letak perusahaan di Jorong Pasar Durian, Nagari Manggopoh ini menimbulkan konflik yang berdampak pada hubungan hubungan sosial dalam masyarakat dan menimbulkan adanya perpecahan antar masyarakat. Dimana dalam penetapan administrasi tata letak perusahaan tidak dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Dimana dalam penetapan ini ditetapkan oleh orang yang memiliki wewenang dalam lingkungan tertentu, dan tidak harus memegang otoritas pada lingkungan lainnya. Begitu juga dengan transparansi penerimaan karyawan di perusahaan. Merujuk pada teori otoritas dari Ralf Dahrendorf dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan pihak pemegang otoritas sementara masyarakat tidak memegang otoritas.

Ralf Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat dalam konflik menjadi tiga tipe yaitu terdapat kelompok semu, yang merupakan kumpulan dari pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Tipe yang kedua adalah kelompok kepentingan yang terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas dimana kelompok kepentingan kepentingan ini mempunyai struktur organisasi program dan tujuan serta anggota yang jelas di mana pada kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata dari timbulnya konflik atau munculnya kelompok konflik dalam masyarakat (Fauzan & Handoyo, 2015). Pada konflik mengenai tuntutan serikat pekerja Pembentukan serikat pekerja baru yaitu FSPTI (Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia) terbentuk dan terlibat dalam kelompok kepentingan konflik, dimana sebelumnya terdapat kelompok semu yaitu masyarakat di Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh. Seiring dengan adanya konflik maka masyarakat yang awalnya termasuk ke dalam kelompok semu memutuskan untuk bersatu menjadi suatu kelompok kepentingan dengan nama FSPTI. Dalam menunjang kepentingan kelompoknya FSPTI juga membentuk struktur yang terdiri dari ketua, wakil, dan terdapat anggota dengan berdasarkan tujuan yang sama yaitu untuk dapat mengambil alih kerjasama serikat pekerja IPTJS dengan PT BSS. Dahrendorf menyatakan bahwa setelah kelompok konflik muncul, kelompok konflik itu akan melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Namun, aksi yang dilakukan serikat baru FSPTI hanya sekedar memblokade jalan sehingga tidak menimbulkan perubahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilakukan oleh peneliti dilapangan dan dilengkapi dengan data-data tertulis seperti arsip dan notulen konflik, maka diperoleh bukti dan informasi yang menjelaskan bahwa pada konflik masyarakat Nagari Manggopoh dengan perusahaan, dimana PT BSS yang memegang otoritas atau berada pada posisi superordinate dan masyarakat yang tidak memiliki otoritas atau yang berada pada posisi subordinat. Dimana perusahaan dikatakan sebagai superordinat seperti yang dikatakan Ralf Dahrendorf dikarenakan adanya kedekatan dengan elite lokal, dan ketidak jelasan aturan sehingga perusahaan yang superordinate dapat mempertahankan status quo dan disisi lainnya masyarakat yang menuntut untuk melakukan perubahan.

Peneliti juga berharap kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih dalam serta menyempurnakan penelitian yang telah peneliti lakukan. Adapun saran penelitian yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya yaitu peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Hal tersebut menjadi sebuah pembahasan yang menarik untuk dikaji pada penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2016). Metode penelitian kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(1).
- Afandi, A. H. (2016). Masyarakat Pesantren dan Resolusi Konflik (Pesantren and Community Conflict Resolution). *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(1), 1809.
- Fitriyah, D.A. & Widayati, W. (2018). Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. *Jurnal Of Politic and Government Studies.*, 3(1), 1–285.
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42.
- Fauzan, A., & Handoyo, P. (2015). Resistensi Terselubung Buruh Helper Gudang PT. Unirama Duta. Universitas Negeri Surabaya.
- Hasibuan, Y. F., & Susilawati, N. (2023). Faktor Penyebab Konflik Sosial Penetapan Pejabat Kepala Desa di Desa Sampuran Simarloting Kecamatan Huluhupas Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 127–134. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.742>
- Jhonson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 2*. Jakarta: Gramedia.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya.
- Periady, E., & Musa, P. (2020). Konflik Sosial Masyarakat dengan Perusahaan Sawit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.
- Putri, R. R. (2018). Konflik Sosial Dalam Novel Dawuk : Kisah Kelabu Dari Rumbuk Randu Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Teori Ralf Dahrendorf) Rany Rizkyah Putri Abstrak. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(1), 1–7.
- Safrizal, B. & Siti, K. (2022). Konflik Sosial Ekonomi Masyarakat Atas Keberadaan PT. Batubara Energi Lestari di Desa Paya Udeung Kec Seunagan Kab Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 7(3). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/fisip>
- Senjawati, R. A., & Fakhruddin, F. (2017). Motivasi warga belajar dalam mengikuti pendidikan kesetaraan program kelompok belajar paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tunas bangsa brebes. *Journal of Nonformal Education*, 3(1), 40-46.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48.
- Utari, R., Zubir, Z., & Lindayanti. (2021). Analisa Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Riau Antara Masyarakat Dengan Perusahaan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 310–330. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>